
Analisis Peningkatan Upaya Pemungutan Pajak (*Tax Effort*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Annisa Dwi Paramitha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
annisa.paramitha@kemenkeu.go.id

Rinaldi Rustam*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
rinaldi.rustam@trisakti.ac.id

Ari Mulianta Ginting

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
arigins2@gmail.com

Abstract

Regional Tax Collection Efforts in Indonesia are still low. Only a few local governments in Indonesia have Tax Effort values above the average. There is a unique fact that the 3 (three) regions that contribute the largest regional taxes in Indonesia (apart from DKI Jakarta), namely the regions in West Java, East Java and Central Java, actually have Tax Effort values that are still below average. In contrast to previous research, the aim of this research is to determine the influence of the GDP per capita variables, Development of the Processing Industry Sector, Development of the Service Sector, Number of MSMEs, and Capital Expenditures on Regional Tax Collection Efforts in Central Java Province in one model. Apart from that, this research also includes the number of MSMEs, where not many previous studies have discussed this. The data used in this research is secondary data with panel data type. The data period on this research is seven years, starting from 2017 to 2023. This research involved 35 districts/cities in Central Java Province. The data used in this research comes from the Ministry of Finance (Directorate General of Fiscal Balance) and the Central Statistics Agency. This research method uses multiple linear regression analysis methods. The research results show that the development of the service sector and MSMEs has had a positive impact on Regency/City Tax Collection Efforts in Central Java.

Keywords

tax effort; GRDP per capita; MSMEs; services; manufacturing

Pendahuluan

Pajak merupakan harga yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan layanan publik dari negara (Smith, 1776). Keynesianisme menekankan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui penggunaan pajak untuk membiayai pengeluaran publik (Keynes, 1937). Model Lewis tentang pembangunan ekonomi dualistik menunjukkan bahwa pajak dapat digunakan untuk mentransfer surplus dari sektor tradisional ke sektor modern, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Lewis, 1954).

*) Corresponding Author

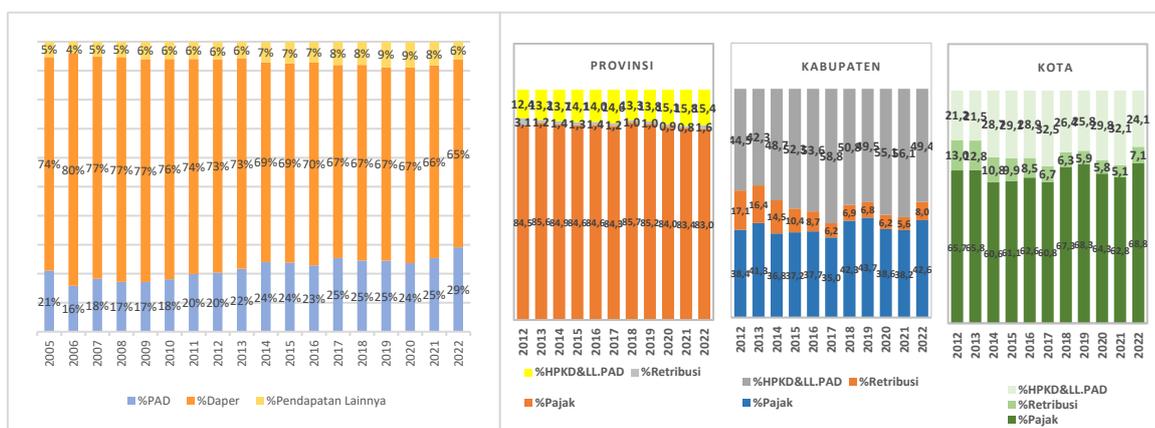
Dalam konsepsi teorema desentralisasi adalah bahwa dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah akan lebih efisien dalam menyediakan tingkat output barang publik yang efisien secara Pareto untuk yurisdiksinya masing-masing (Oates, 2006). Namun, kebanyakan di negara yang sedang berkembang, alokasi transfer lebih difokuskan pada sisi pengeluaran (belanja) daerah dan kurang memerhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam pengumpulan pajak daerah (Naganathan & Sivagnanam, 1999). Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kemampuan pengumpulan pajak dapat menyebabkan daerah semakin bergantung terhadap pusat dan peningkatan alokasi transfer ke daerah (Shah, 1994).

Gambar 1. menunjukkan bahwa dalam rentang Tahun 2005 s.d. 2022, Transfer ke Daerah (TKD) selalu menyumbang porsi terbesar pada penerimaan daerah (sekitar 70%). Sedangkan, penerimaan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya menyumbang sekitar 22% dari total penerimaan daerah. Fakta lainnya, juga didapati bahwa meskipun tren penerimaan daerah selalu mengalami kenaikan tetapi realisasi TKDD juga meningkat. Dalam 17 tahun, kenaikan dana perimbangan hampir 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2005 sejumlah Rp133,15 triliun menjadi sebesar Rp738,18 triliun.

Mengenai kondisi penerimaan pajak daerah, lebih detail disajikan juga pada Gambar 1 bahwa komponen dalam PAD selama 10 tahun terakhir. Penerimaan pajak menjadi komponen terbesar PAD. Penerimaan pajak terhadap PAD pada daerah Provinsi rata-rata sebesar 84,5%, pada daerah kota sebesar 64,4%, sedangkan pada daerah kabupaten hanya sebesar 39,3%. Namun, jika dibandingkan dengan seluruh total penerimaan daerah, penerimaan pajak rata-rata pada daerah provinsi hanya sebesar 41,2%, daerah kabupaten hanya sebesar 4,5% persen, bahkan pada daerah kota hanya sebesar 3,9%.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan *Tax Effort* perlu didukung oleh semua pihak, baik masyarakat maupun wajib pajak. Dengan meningkatkan *Tax Effort*, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Kemenkeu, 2023). Namun, secara regional, Gambar 2. memperlihatkan bahwa rata-rata *Tax Effort* Daerah pada setiap wilayah provinsi di Indonesia masih rendah. Daerah dengan *Tax Effort* di atas rata-rata nasional yaitu hanya wilayah DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Banten, NTT, Jawa Barat, Maluku, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, dan Maluku Utara. Sedangkan, untuk daerah-daerah lainnya nilai *Tax Effort* masih di bawah rata-rata.

Selain itu, mengenai besaran penerimaan pajak per regional, pada Gambar 2. terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) wilayah daerah penyumbang terbesar pajak daerah di Indonesia (selain DKI Jakarta). Secara berurutan, ketiga daerah tersebut yaitu pertama daerah-daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 17,11%, kedua di wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar 11,78%, dan ketiga di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,98%. Dari data tersebut didapati fakta unik bahwa untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masuk tiga besar wilayah penyumbang pajak daerah tertinggi di Indonesia justru memiliki nilai *Tax Effort* yang masih berada di bawah rata-rata.



Gambar 1: Komposisi Pendapatan Daerah dan Proporsi Pajak Daerah, PAD di Indonesia (Persen)
 Sumber: DJPK, Kemenkeu (2024), data diolah

menggunakan/menggabungkan beberapa variabel yang berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terbukti berpengaruh terhadap *Tax Effort* yaitu PDRB perkapita, Perkembangan Sektor Industri Manufaktur, Perkembangan Sektor Jasa, Jumlah UMKM, dan Belanja Modal. Adapun, beberapa penelitian terdahulu juga didapati masih memberikan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh masing-masing variabel dimaksud terhadap *Tax Effort*. Selain itu, penelitian ini memasukan data jumlah UMKM sebagai variabel independen yang masih jarang digunakan, padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Penentuan lokasi daerah penelitian, pembaruan tahun penelitian, dan pemilihan variabel independen menjadi keterbaruan (*gap*) dari penelitian terdahulu.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh PDRB Perkapita terhadap *Tax Effort*

Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan membayar pajak daerah, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan PAD secara tidak langsung (Muhammad, 2021). Lakshmanasamy (2022) mendapatkan hasil penelitian di negara-negara bagian di India bahwa PDRB per kapita berdampak positif secara signifikan terhadap pendapatan pajak/*net share domestic product*. Yousaf et al. (2022) menemukan hasil yang sama di Pakistan, bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan lokal pemerintah. Di Indonesia, PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah provinsi (Susila & Pradhani, 2022).

H1: PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap *Tax Effort* daerah di Prov. Jawa Tengah

Pengaruh Perkembangan Sektor Industri Manufaktur terhadap *Tax Effort*

Teori Hirschman menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur dapat menghasilkan efek *spillover* positif ke sektor lain dalam perekonomian, sehingga meningkatkan pendapatan dan *Tax Effort* secara keseluruhan (Hirschman, 1959). Selain itu, sektor manufaktur padat karya membutuhkan banyak tenaga kerja, dan meningkatkan basis pajak (teori struktur ekonomi). PDRB Sektor Pertambangan, Industri Manufaktur, Konstruksi, dan Perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pajak Daerah (Safitri et al., 2020). Sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (Hia et al., 2024). PDRB Sektor Industri Manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dimana meningkatnya nilai PDRB menunjukkan peningkatan penjualan atau output di suatu daerah, yang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja (Asmara, 2018).

H2: Perkembangan Sektor Industri Manufaktur berpengaruh positif terhadap *Tax Effort* daerah di Prov. Jawa Tengah

Pengaruh Perkembangan Sektor Jasa terhadap *Tax Effort*

Pertumbuhan sektor jasa dapat menarik migran dan meningkatkan basis pajak (Dunn, 1988; Partridge & Rickman, 2000). Hal ini terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu: 1) penciptaan lapangan kerja, 2) peningkatan pendapatan; dan 3) diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi, sehingga meningkatkan basis pajak. (Teori *Shift-Share*). Sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan yang jauh lebih besar dibandingkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Ernita & Harahap (2024). Sektor pertanian berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan sektor perdagangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Wahyuningtias (2021). Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata di Jawa Tengah berdampak positif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Faktor yang paling berperan dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah adalah PDRB Sektor Pariwisata. (Agus dan Sari, 2021).

H3: Perkembangan Sektor Jasa berpengaruh positif terhadap *Tax Effort* daerah di Prov. Jawa Tengah

Pengaruh Jumlah UMKM terhadap *Tax Effort*

Teori ekonomi klasik Adam Smith (1776) bahwa pembagian kerja dan spesialisasi merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. UMKM dianggap sebagai contoh nyata dari penerapan teori ini, di mana usaha kecil dan menengah dapat fokus pada spesialisasi mereka dan bersaing dengan perusahaan besar di pasar yang berbeda. UMKM juga berkontribusi pada basis pajak, meskipun kontribusinya per unit kecil.

Namun, akumulasi kontribusi pajak dari banyak UMKM dapat menjadi sumber pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah. (Teori Ekonomi Skala Kecil). UMKM formal meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak (Teori Inklusi Keuangan). Jumlah UMKM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sipur & Alamstoni, 2021). Selain itu, dalam skala regional, penelitian di Brebes didapati bahwa UMKM dan investasi UMKM berdampak positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi (Safitri et al., 2020). Banyaknya UKM dan Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Utara berpengaruh besar pada peningkatan tenaga kerja yang diserap (Tasyim et al., 2021).

H4: Jumlah UMKM berpengaruh positif terhadap *Tax Effort* daerah di Prov. Jawa Tengah

Pengaruh Belanja Modal terhadap *Tax Effort*

Belanja Modal (BM) memiliki dampak positif signifikan terhadap *Tax Effort* (TE) (Nugroho & Wana, 2021). Infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan raya, air bersih, hotel, penginapan dan restoran masing-masing berpengaruh positif secara signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah Rokhmat et al. (2020). Infrastruktur fisik, khususnya infrastruktur transportasi, memberikan kontribusi positif kepada pembangunan ekonomi melalui penciptaan efek pengganda multiplier investasi, lapangan kerja, dan output per tenaga kerja (Gibbons et al., 2019).

H5: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap *Tax Effort* daerah di Prov. Jawa Tengah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model ekonometrika regresi data panel. Fokus utama penelitian adalah menganalisis dan mengkaji dampak variabel-variabel seperti PDRB perkapita, Perkembangan Sektor Industri Manufaktur, Perkembangan Sektor Jasa, Jumlah UMKM, dan Belanja Modal terhadap *Tax Effort* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian melibatkan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sumber data diperoleh dari Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan Badan Pusat Statistik. Adapun, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan berjenis data panel. Rentang waktu penelitian mencakup tujuh tahun, mulai dari tahun 2017 hingga 2023 dengan pertimbangan bahwa periode data dimaksud telah memenuhi untuk melihat kondisi perkembangan data sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Berkaitan dengan kondisi data pada pandemi Covid-19 bahwa dalam penelitian ini tidak dilakukan uji beda dikarenakan dari pengamatan bahwa fluktuasi data penelitian pada saat pandemi Covid-19 didapati masih dalam tatanan normal. Sebagai contoh didapati data rata-rata penerimaan pajak daerah di Jawa Tengah pada Tahun 2019 sebelum pandemi sebesar Rp 457,3 miliar, pada saat pandemi Tahun 2020 menurun sebesar Rp455 miliar dan pada Tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar Rp483,1 miliar, serta pasca pandemi meningkat kembali menjadi sebesar Rp 570,3 miliar.

Model dalam persamaan yang digunakan untuk menganalisis dampak PDRB Perkapita, Perkembangan Sektor Industri Manufaktur, Perkembangan Sektor Jasa, Jumlah UMKM, dan Belanja Modal terhadap Upaya Pemungutan pajak (*Tax Effort*), dirumuskan sebagai berikut:

$$TE_{it} = \alpha_{it} + B_1PDRB_{capit} + B_2MVAg_{it} + B_3SVAg_{it} + B_4UMKM_{it} + B_5BM_{it} + e_{it}$$

Dimana:

TE_{it}	= Upaya Pemungutan Pajak (<i>Tax Effort</i>)
$PDRB_{capit}$	= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota i, pada tahun t
$MVAg_{it}$	= Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Kabupaten/Kota i, pada tahun t
$SVAg_{it}$	= Perkembangan Sektor Jasa Kabupaten/Kota i, pada tahun t
$UMKM_{it}$	= Jumlah UMKM Kabupaten/Kota i, pada tahun t
BM_{it}	= Belanja Modal Kabupaten/Kota i, pada tahun t
e	= error term
α_{it}	= konstanta
$B_1 B_2 B_3 B_4 B_5$	= parameter regresi yang akan diestimasi
i	= kabupaten/kota yang akan diobservasi
t	= periode observasi

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Penjelasan
1	Tax Effort (TE)	Definisi: Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, dievaluasi melalui perbandingan antara jumlah pajak yang terkumpul (realisasi pajak) dengan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah yang bersangkutan. Indikator: Indeks upaya pemungutan pajak. Sumber: Diolah penulis (Kemenkeu & BPS). Satuan: Persen.
2	PDRB Perkapita (PDRBcap)	Definisi: Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indikator: Nilai PDRB Perkapita. Sumber: BPS. Satuan: Rupiah
3	Perkembangan Sektor Industri Manufaktur (MVAg)	Definisi: Persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri Manufaktur dari tahun sebelumnya. Indikator: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan. Sumber: Diolah Penulis (Sumber: BPS). Satuan: Persen
4	Perkembangan Sektor Jasa (SVAg)	Definisi: Persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Jasa dari tahun sebelumnya. Indikator: Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa. Sumber: Diolah Penulis (Sumber: BPS). Satuan: Persen.
5	Jumlah UMKM (UMKM)	Definisi: Jumlah unit usaha yang dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Indikator: Jumlah UMKM. Sumber: BPS. Satuan: unit.
6	Belanja Modal (BM)	Definisi: Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap atau meningkatkan nilai aset tetap yang sudah ada. Indikator: Belanja Modal Daerah. Sumber: Kemenkeu. Satuan: Rupiah.

Sumber: Penulis, 2024

Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Statistik Deskriptive

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) sedangkan variabel independen yang digunakan meliputi PDRB Perkapita (PDRBCAP), Perkembangan Sektor Industri Manufaktur (MVAg), Perkembangan Sektor Jasa (SVAg), Jumlah UMKM (UMKM), dan Belanja Modal Daerah (BM).

Pengujian statistik deskriptif pada penelitian menggunakan 245 observasi. Hasil pengujian didapati bahwa pada tahun yang diamati nilai rata-rata *Tax Effort* (LTE) di daerah penelitian adalah sebesar 0,567184% dan standar deviasi dengan nilai 0,233587%. Adapun, nilai maksimum untuk variabel *Tax Effort* (LTE) yaitu 1,36% dengan nilai minimum berada pada 0,01%. PDRB Perkapita diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp27.965.459 dan standar deviasi dengan nilai Rp18.308.612. Sedangkan, untuk nilai maksimum PDRB Perkapita yaitu sebesar Rp95.500.682 dengan nilai minimum sebesar Rp11.193.733.

Selanjutnya, untuk variabel Perkembangan Sektor Industri Manufaktur (MVAg) diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,250694% dan standar deviasi sebesar 2,992419%. Sedangkan, nilai maksimum MVAg sebesar 12,980% dengan nilai minimum sebesar -13,850%. Disamping itu, untuk variabel Perkembangan Sektor Jasa (SVAg) diperoleh nilai rata-rata sebesar 5,136367% dan standar deviasi sebesar 3,758961%. Nilai maksimum variabel SVAg sebesar 13,750 dan nilai minimum-nya sebesar -6,050%. Untuk variabel Jumlah UMKM (UMKM) nilai rata-rata diperoleh sebesar 280.810,90 dan standar deviasi sebesar 174.908,33. Nilai maksimum variabel UMKM yaitu sebanyak 1.226.892,00 dan nilai minimum yaitu 151.981,00. Yang terakhir, variabel Belanja Modal/ BM diperoleh bahwa nilai rata-rata Rp335.602,38 juta dan standar deviasi sebesar Rp175.408,10 juta. Adapun, nilai maksimum pada variabel BM sebesar Rp1.275.359,09 juta dengan nilai minimum berada pada Rp75.192,21.

Tabel 2. Statistik Deskriptive Variabel-variabel Penelitian

Variabel	Jumlah Observasi	Nilai Rata-rata	Deviasi Standar	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
Variabel Dependen					
<i>Tax Effort</i> (TE)	245	0,567184	0,233587	1,360000	0,010000
Variabel Independen					
PDRB Perkapita / PDRBCAP	245	27.965.459	18.308.612	95.500.682	11.193.733
Perkembangan Sektor Industri Manufaktur (MVAg) - juta	245	4,250694	2,992419	12,980	-13,850
Perkembangan Sektor Jasa (SVAg) – juta	245	5,136367	3,758961	13,750	-6,050
Jumlah UMKM (UMKM)	245	280.810,90	174.908,33	1.226.892,00	151.981,00
Belanja Modal/ BM - juta	245	335.602,38	175.408,10	1.275.359,09	75.192,21

Sumber: Data diolah (2024)

Analisis Data Panel**Penentuan Model Regresi Panel dan Metode Estimasi**

Sebelum penulis melakukan estimasi model yang digunakan dalam analisa regresi panel, maka dilakukan uji hipotesis yaitu Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian berdasarkan Tabel 3. dan Tabel 4. kesimpulannya adalah bahwa metode Efek Tetap/FEM/LSDV yang paling tepat digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	83.515.040	-34,205	0.0000
Cross-section Chi-square	661.030.999	34	0.0000

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	79.641.199	5	0.0000

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 5. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	13,43824	3,435399	0,0007
PDRBCAP	0,249505	1,780220	0,0765
MVAG	-0,096094	-1,897666	0,0591
SVAG	0,096266	3,429608	0,0007
UMKM	1,963897	10,041720	0,0000
BM	0,004806	0,087666	0,9302
R2	0,940901		
Adjusted R2	0,929657		
Fstatistik			83,6854
Prob F-Stat			0,000000
Jumlah Observasi			254

Sumber: Data diolah (2024)

Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh hasil bahwa variabel Perkembangan Sektor Jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Effort* dengan nilai Prob sebesar 0,0007, signifikan pada $\alpha \leq 0,05$. Artinya, peningkatan sektor jasa di daerah meningkatkan upaya pemungutan pajak daerah tersebut. Selain itu, bahwa jumlah UMKM juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Tax Effort* daerah dengan nilai Prob sebesar 0,0000 atau $\alpha \leq 0,05$, signifikan pada $\alpha \leq 0,05$. Sebaliknya, PDRB Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prob sebesar $0,0765 > 0,05$ Artinya, peningkatan PDRB Perkapita suatu daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan upaya pemungutan pajak daerah tersebut. Sama halnya, variabel belanja modal daerah juga didapati hasil tidak berpengaruh terhadap upaya pajak, dengan nilai Prob sebesar 0,9302. Disamping itu, perkembangan industri manufaktur justru berpengaruh negatif bahkan hampir signifikan terhadap *Tax Effort* dengan nilai Prob sebesar 0,0591, mendekati nilai $\alpha = 0,05$.

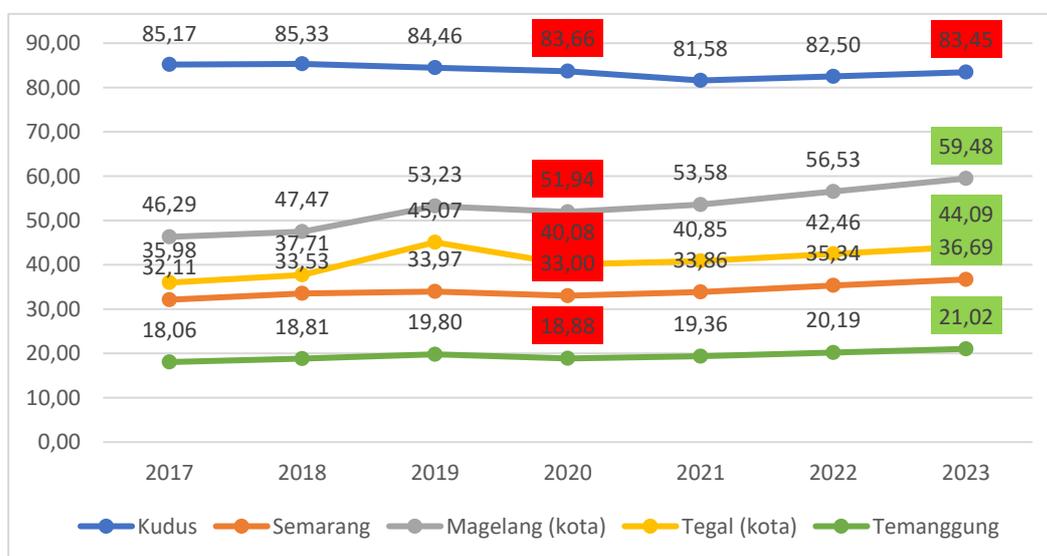
Nilai F-statistik sebesar 83,6854 dengan nilai Prob (F-statistik) 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Effort*. Hal ini berarti model yang dibangun dengan variabel independen tersebut secara statistik valid dalam menjelaskan variasi pada *Tax Effort*. Selain itu, nilai *Adjusted R-squared* (Adj R2) sebesar 0,929657 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan 92,97% variasi dari variabel dependen *Tax Effort*. Sisa 7,03% variasi kemungkinan disebabkan oleh faktor lain yang tidak diamati atau variabel lain yang tidak masuk pada model penelitian namun tetap mempengaruhi *Tax Effort*.

Pembahasan

Pengaruh PDRB Perkapita terhadap *Tax Effort* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak (*Tax Effort*). Artinya, semakin besar PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh terhadap nilai *Tax Effort* daerah tersebut. Selain itu, berarti bahwa peningkatan PDRB Perkapita belum dapat meningkatkan upaya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dan pengalihan potensi pajak daerahnya.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan dunia secara keseluruhan. Sektor pariwisata, perdagangan, dan industri mengalami guncangan hebat akibat penurunan permintaan dan gangguan rantai pasok global. Banyak usaha terpaksa tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi melambat drastis. Didapati fakta bahwa seluruhnya yaitu sebanyak 35 daerah di Jawa Tengah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 imbas pandemi Covid-19, bahkan sampai bernilai minus. Terdapat 5 (lima) daerah dengan penurunan paling signifikan yaitu Kudus, Semarang, Magelang (kota), Tegal (kota), dan Temanggung.



Gambar 3. PDRB Perkapita Daerah Terdampak Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah

Sumber: BPS, 2024 (data diolah)

Tabel 6. Komposisi dan Rata-rata Serapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Skala Usaha di Jawa Tengah

Skala Usaha	Kuantitas (unit)	Tenaga Kerja (orang)	Serapan Tenaga Kerja / unit (orang)
Besar	1.462	1.032.366	706
Sedang	2.832	98.026	35
Kecil dan Menengah	892.108	1.735.604	2

Sumber: BPS, 2023 (data diolah)

Pendapatan perkapita daerah di Jawa Tengah memiliki tren meningkat sejak 2017 sampai 2023, tetapi belum dapat berdampak signifikan terhadap upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) daerah. Posisi pendapatan perkapita dari 5 (lima) daerah paling terdampak Covid-19 di Jawa Tengah yaitu Kudus, Semarang, Magelang (kota), Tegal (kota), dan Temanggung. Bahkan, untuk Kabupaten Kudus hingga tahun 2023 belum berhasil pulih dari penurunan PDRB Perkapita imbas Covid-19.

Pengaruh Perkembangan Sektor Industri Manufaktur terhadap *Tax Effort* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan Sektor Industri Manufaktur berdampak negatif bahkan hampir signifikan terhadap *Tax Effort* Daerah di Jawa Tengah. Artinya, setiap peningkatan Perkembangan Sektor Industri Manufaktur daerah di Jawa Tengah menyebabkan penurunan upaya pemungutan pajak daerah tersebut. Dalam hal ini, setiap kenaikan Perkembangan Industri Manufaktur sebesar 1% akan terjadi penurunan *Tax Effort* daerah sebesar 0,09%. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya seperti pergeseran basis pajak, struktur ekonomi (khususnya struktur industri manufaktur), struktur permodalan, disparitas industri manufaktur, dan juga faktor eksternal.

Pertama, pergeseran struktur pajak dari sektor tradisional ke sektor manufaktur, memungut pajak dari sektor manufaktur generally membutuhkan biaya yang lebih tinggi, sehingga dapat mengimbangi atau bahkan melebihi peningkatan pendapatan pajak dari sektor tersebut.

Kedua, struktur ekonomi, khususnya struktur industri manufaktur, di Jawa Tengah yang didominasi Industri Kecil dan Menengah (IKM). IKM kurang dapat mendongkrak ekonomi, margin keuntungan kecil, dan penyerapan tenaga kerja rendah sehingga dapat menyebabkan penurunan Tax Ratio meskipun sektor manufaktur mengalami pertumbuhan.

Ketiga, struktur permodalan, Dalam industri manufaktur, bahwa modal asing juga didapati berkontribusi besar dalam sektor industri manufaktur di Jawa Tengah. Jumlah perusahaan industri manufaktur asing di Jawa Tengah sebanyak 253 unit (7%) jauh di atas kepemilikan pemerintah yang hanya sebanyak 47 unit (1%). Kepemilikan perusahaan industri manufaktur di Jawa Tengah didominasi oleh Perorangan dengan jumlah 2.383 unit (63%). Penanaman modal asing (PMA) yang tinggi dapat berakibat negatif pada upaya pajak, terutama dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh skema perpajakan kompleks yang digunakan perusahaan PMA untuk meminimalkan kewajiban pajak, insentif pajak menarik yang ditawarkan pemerintah kepada investor asing (Tax Heaven), kurangnya transparansi struktur kepemilikan dan operasi perusahaan PMA, penggunaan tenaga kerja asing dan ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan.

Keempat, disparitas yang tinggi di Jawa Tengah dalam Industri Manufaktur. bahwa untuk tiga daerah yaitu Kab. Cilacap, Kab. Kudus, dan Kota Semarang memiliki nilai perkembangan industri manufaktur yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan daerah lainnya, berpotensi menurunkan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh terpusatnya aktivitas ekonomi dan pergeseran pajak di daerah maju, serta minimnya diversifikasi ekonomi dan kapabilitas administrasi di daerah tertinggal.

Yang terakhir, **kelima, faktor eksternal**. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi atau bencana alam dapat menyebabkan penurunan permintaan produk manufaktur. Penurunan permintaan ini dapat berakibat pada penurunan profitabilitas perusahaan manufaktur, sehingga menurunkan kemampuan mereka untuk membayar

pajak. Bencana Covid-19 telah membawa dampak yang cukup besar pada industri manufaktur di wilayah Jawa Tengah. Seluruh daerah di Jawa Tengah sempat mengalami penurunan PDRB sektor Industri Pengolahan. Bahkan, khusus untuk Kabupaten Kudus dan Cilacap didapati nilai PDRB sektor industri pengolahan-nya belum pulih imbas Pandemi Covid-19.

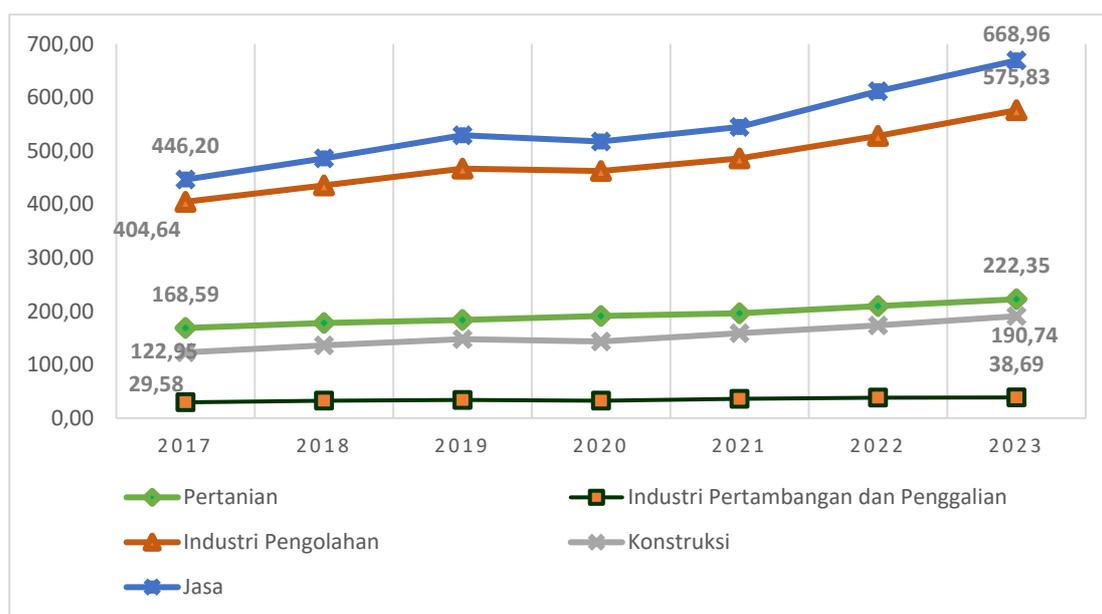
Pengaruh Perkembangan Sektor Jasa terhadap Tax Effort Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan Sektor Jasa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*). Berarti, semakin besar perkembangan sektor jasa di daerah pada pada wilayah Prov. Jawa Tengah maka semakin besar nilai *Tax Effort* daerah tersebut. Dalam hal ini, setiap kenaikan Perkembangan Sektor Jasa sebesar 1% akan terjadi peningkatan *Tax Effort* daerah sebesar 0,25%. Hasil ini dapat disebabkan oleh faktor adanya perkembangan yang baik pada sektor jasa di Jawa Tengah.

Sumbangan sektor jasa terhadap PDRB menurut lapangan usaha di Jawa Tengah adalah yang terbesar. Komposisi PDRB menurut lapangan usaha di Jawa Tengah didominasi oleh sektor jasa yaitu sebesar Rp669 triliun (38,71%), kedua adalah sektor Industri Pengolahan sebesar Rp575,8 triliun (34,18%), ketiga yaitu sektor Pertanian sebesar Rp222,3 triliun (13,73%), kemudian sektor Konstruksi sebesar Rp190 triliun (10,92%), dan terakhir yaitu sektor Industri Pertambangan dan penggalian Rp38,7 triliun (2,46%).

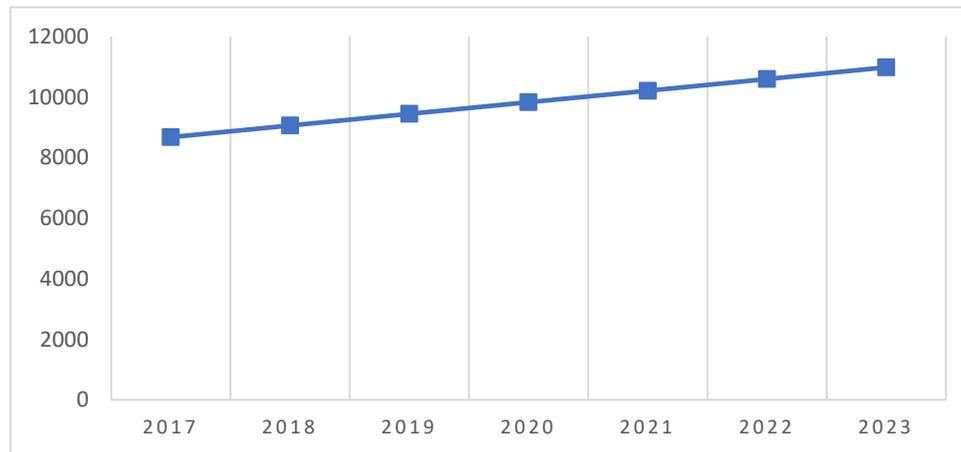
Adapun, sektor jasa yang dominan di Jawa Tengah dari rentang tahun 2017 sampai 2023 yaitu: 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor rata-rata sebesar 35,35%; 2) Jasa Pendidikan rata-rata sebesar 11,51%; 3) Transportasi dan Pergudangan rata-rata sebesar 10,11%; 4) Informasi dan Komunikasi rata-rata sebesar 8,23%; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum rata-rata sebesar 8,21%; dan 6) Jasa Keuangan dan Asuransi rata-rata sebesar 7,68%.

Secara regional bahwa sektor jasa di Kota Semarang (kota) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal yang sama juga didapati di Surakarta (kota), Banyumas, Cilacap, dan Brebes. Sektor jasa yang berkembang di Semarang (kota), Surakarta (kota), Banyumas, Cilacap, dan Brebes dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kota-kota tersebut mungkin memiliki keunggulan kompetitif tertentu, seperti infrastruktur yang lebih baik, aksesibilitas yang lebih mudah, keberadaan universitas atau institusi pendidikan yang mendukung, serta kebijakan pemerintah daerah yang pro-bisnis. Selain itu, faktor sejarah, lokasi geografis, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat memengaruhi pertumbuhan sektor jasa yang lebih pesat di daerah-daerah tersebut.



Gambar 4. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan usaha Per Sektor di Jawa Tengah

Sumber: BPS, 2024 (data diolah)



Gambar 5. Perkembangan UMKM di Jawa Tengah (ribu unit)

Sumber: BPS, 2024 (data diolah)

Pengaruh Perkembangan Jumlah UMKM terhadap *Tax Effort* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian mendapati bahwa Jumlah UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Effort* daerah di wilayah Prov. Jawa Tengah. Artinya, semakin banyak jumlah UMKM di daerah pada wilayah tersebut maka semakin tinggi nilai *Tax Effort* daerah tersebut. Dalam hal ini, setiap kenaikan jumlah UMKM sebesar 1% akan meningkatkan *Tax Effort* daerah sebesar 1,96%. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perkembangan yang baik pada UMKM di Jawa Tengah.

Nilai koefisien dari variabel jumlah UMKM positif dan sangat signifikan terhadap *Tax Effort* daerah di Jawa Tengah. Bahkan, nilai koefisien hasil regresi dari Jumlah UMKM ini adalah yang terbesar diantara variabel lainnya. Hasil ini menggambarkan bahwa keberadaan UMKM di daerah Jawa Tengah menjadi penyelamat, di saat sektor industri manufaktur berdampak negatif dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan dalam peningkatan upaya pajak di Jawa Tengah.

Perkembangan jumlah UMKM di Jawa Tengah cukup signifikan. Jumlah UMKM di Jawa Tengah dari Tahun 2017 s.d. 2023 mengalami kenaikan sebesar 27%. Keseluruhan daerah di wilayah Jawa Tengah mengalami tren peningkatan jumlah UMKM secara terus menerus dari tahun ke tahun, sejak tahun 2017 s.d. 2023. Bahkan, pada saat pandemi covid-19 pun seluruh daerah di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan jumlah UMKM. Selain itu, bersumber dari sensus ekonomi BPS Tahun 2016 bahwa jumlah UMKM di Jawa Tengah yaitu terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Menurut data sensus ekonomi BPS 2016, diketahui bahwa jumlah UMK di Jawa Tengah tersebar di seluruh lapangan usaha dengan jumlah terbesar pada sektor: 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 43,3%; 2) Industri Pengolahan sebesar 24,59%; dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 14,9%. Hal ini selaras dengan jumlah penyerapan tenaga kerja UMK juga didominasi oleh ketiga sektor tersebut. Jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja skala UMK lebih besar dibandingkan dengan skala UMB. Dalam hal ini berarti bahwa keberadaan UMK di Jawa Tengah dapat menjadi penopang perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi potensi sumber pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Selain itu, didapati juga bahwa beberapa lapangan usaha dengan balas jasa UMK di Jawa Tengah dominan yaitu: 1) Pendidikan; 2) Industri Pengolahan; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; 4) Konstruksi; dan 5) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Disamping itu, untuk lapangan usaha tertentu jumlah balas jasa/upah skala UMK di Jawa Tengah jauh lebih besar dibandingkan skala UMB. Beberapa lapangan usaha dengan balas jasa UMK lebih besar dibandingkan dengan UMB di Jawa Tengah yaitu pada sektor: 1) Pendidikan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; 3) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; 4)

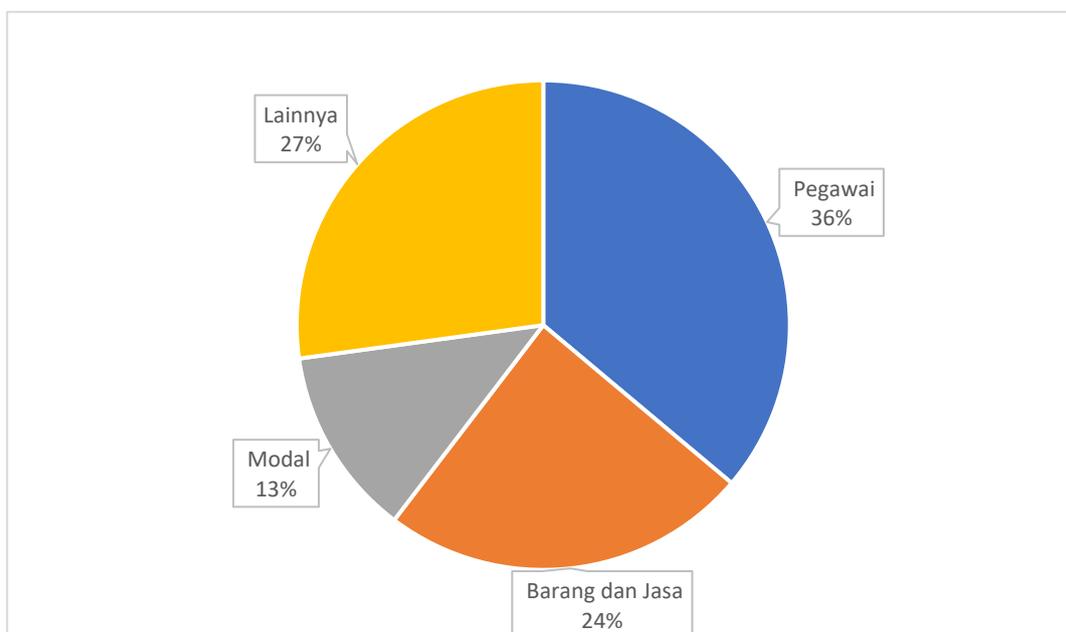
Konstruksi; 5) Jasa Lainnya. Sedangkan, untuk Industri Pengolahan imbal jasa masih lebih dominan dari sektor UMB. Padahal, sektor Industri Pengolahan didapati jumlah tenaga kerja yang lebih banyak pada skala UMK dibandingkan UMB. Hal ini juga turut mendukung hasil regresi yang menunjukkan pengaruh negatif dan hampir signifikan perkembangan sektor industri manufaktur terhadap *Tax Effort* daerah di Jawa Tengah sebagaimana bahasan sebelumnya.

Pengaruh Belanja Modal terhadap *Tax Effort* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap upaya pemungutan pajak di Jawa Tengah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu kuantitas dan perkembangan belanja modal di Jawa Tengah yang masih rendah serta tata kelola dan kualitas belanja modal yang masih belum optimal.

Pertama, Kuantitas belanja modal di Jawa Tengah masih rendah. Didapati bahwa belanja daerah di Jawa Tengah didominasi oleh belanja yang bersifat operasional seperti belanja pegawai (rata-rata 36%) dan belanja barang dan jasa (rata-rata 27%). Sedangkan, untuk belanja modal hanya rata-rata sebesar rata-rata 13%. Selain kuantitas, diamati juga mengenai perkembangan belanja moda, didapati bahwa investasi modal daerah di Jawa Tengah menurun dari tahun 2017 sampai 2023. Bahkan realisasi belanja modal pada hampir seluruh daerah di wilayah tersebut menurun pada tahun 2020 ketika pandemi covid-19. Lebih detail per jenis belanja didapati bahwa setiap tahunnya jumlah belanja modal selalu lebih kecil dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Mengenai hal ini, hasil evaluasi belanja wajib (*mandatory spending*) infrastruktur Kemenkeu (2024) juga dilakukan pada tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Rata-rata pangsa alokasi belanja infrastruktur provinsi pada tahun 2022 mencapai 25,55 persen. Angka ini menunjukkan bahwa capaian alokasi belanja infrastruktur provinsi secara nasional masih cukup jauh di bawah 40 persen. Bahkan, capaian alokasi belanja infrastruktur oleh Provinsi Jawa Tengah terpantau hanya 6,75%. Selain itu, ntuk kota-kota di Jawa Tengah capaian belanja infrastruktur rata-rata masih di bawah 25% hanya Kota Semarang yang sudah di atas 25% tetapi juga masih di bawah 40%. Lalu, kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa tengah capaian belanja infrastruktur rata-rata juga masih di bawah 25%.



Gambar 6. Komposisi Belanja Daerah di Jawa Tengah

Sumber: Kemenkeu, 2024 (data diolah)

Selanjutnya, mengenai kualitas belanja modal juga dimungkinkan turut menjadi faktor yang mempengaruhi signifikansinya terhadap *Tax Effort* meliputi efisiensi dan produktivitas, alokasi belanja modal, dan kualitas proyek. Laporan BPK tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam kualitas belanja modal di Jawa Tengah. Masalah-masalah tersebut antara lain: 1) Perencanaan yang kurang matang; 2) Pelaksanaan yang tidak efisien; dan 3) Penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Masalah-masalah ini menyebabkan belanja modal tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Selain itu, beberapa indikator menunjukkan kualitas belanja modal yang buruk dan tata kelola belum dilaksanakan dengan baik di Jawa Tengah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan bahwa : 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) daerah di Prov. Jawa Tengah; 2) Perkembangan Sektor Industri Manufaktur tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) daerah di Prov. Jawa Tengah; 3) Perkembangan Sektor Jasa memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) daerah di Prov. Jawa Tengah; 4) Jumlah UMKM memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) daerah di Prov. Jawa Tengah; dan 5) Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) daerah di Prov. Jawa Tengah.

Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan implikasi terhadap beberapa pihak dalam menjadi rujukan untuk melihat gambaran dampak PDRB Perkapita, Perkembangan Sektor Industri Manufaktur, Perkembangan Sektor Jasa, Jumlah UMKM, dan Belanja Modal dalam kaitannya dengan usaha peningkatan upaya pemungutan pajak (*Tax Effort*) di Jawa Tengah. Selain itu secara spesifik implikasi kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian dengan menggunakan sampel kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan upaya peningkatan *tax ratio* daerah. Pemerintah pusat agar fokus kepada pengembangan industri di daerah yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberi nilai tambah terhadap kabupaten/kota sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan memunculkan sumber-sumber pendapatan baru sehingga *Tax Effort* daerah pun meningkat. Selain itu, menjadi bahan evaluasi atas penerimaan pajak daerah, optimalisasi penerimaan daerah melalui efektivitas penerapan kebijakan perpajakan daerah dalam UU HKPD, peningkatan iklim usaha di daerah perlu difokuskan diantaranya insentif fiskal bagi pelaku usaha dan penerapan tarif pajak yang pro UMKM.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam optimalisasi pendapatan daerah, khususnya sektor perpajakan daerah. Pertama, Pemda di wilayah Provinsi Jawa Tengah agar lebih fokus terhadap pengembangan industri manufaktur di daerah yang memiliki kekuatan *multiplier effect* yang sangat besar dalam peningkatan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perluasan basis pajak. Kedua, keberadaan sektor jasa di Jawa Tengah perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan data yang ada, ditemukan bahwa sektor jasa tertentu berdasarkan data belum terlalu berkembang di Jawa Tengah tetapi menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor: 1) Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; 2) Peralatan Listrik; 3) Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer; dan 4) Komputer, Barang Elektronik dan Optik. Keberadaan beberapa sektor tersebut perlu untuk terus dikembangkan dalam upaya peningkatan *Tax Effort* daerah di Jawa Tengah. Ketiga, UMKM sebagai penyelamat perekonomian di Jawa Tengah perlu terus dioptimalkan, kebijakan pajak daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun turunannya juga diharapkan pro terhadap perkembangan usaha kecil di daerah. Keempat, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas kebijakan belanja modal daerah, perencanaan anggaran dan realisasi belanja modal daerah dalam pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) infrastruktur daerah, dan peningkatan tata kelola belanja daerah.

Bagi pemerintah daerah lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh dan diharapkan dapat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak di daerah yang bersangkutan dan penerapan kebijakan yang mendukung.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan yaitu penelitian tidak melakukan pemisahan pada variabel bebas perkembangan industri manufaktur dengan industri kecil menengah dan penelitian tidak memasukkan variabel terkait kualitas belanja modal, tingkat korupsi, kepatuhan pajak, kebijakan pajak daerah, dan administrasi pajak daerah.

Saran

Merujuk kepada keterbatasan penelitian yang dilaksanakan, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu: 1) Disarankan melakukan penelitian serupa dengan menggunakan data seluruh daerah di Indonesia atau daerah lainnya. Penelitian juga bisa dilakukan dengan melakukan *clustering* daerah berdasarkan kriteria tertentu, misalnya pendapatan pajak, PDRB Perkapita, maupun pertumbuhan ekonomi; 2) Disarankan menggunakan pemisahan variabel bebas pada perkembangan industri manufaktur dengan industri kecil menengah; 3) Disarankan menambahkan variabel terkait seperti kualitas belanja modal, tingkat korupsi, kepatuhan pajak, kebijakan pajak daerah, maupun administrasi pajak daerah sebagai variabel intervening maupun moderasi dalam penelitian.

Daftar Pustaka

- Agus dan Sari. (2021). PDRB Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Cobb Douglas. *Sosio e-Kons*, 13 (03), 222-229.
- Andriany, D., & Qibthiyah, R. M. (2018). Analisis hubungan antara infrastruktur jalan dan tax capacity: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(3), 33–50.
- Asmara, Kiky. (2018). Analisis Peran Sektor Industri Manufaktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, 1(2), 33-38.
- Dunn, R. S. (1988). Shift-share analysis and regional policy. *Economic Development Quarterly*, 2(2), 114-126.
- Ernita & Harahap. (2024). Pengaruh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Kerinci Tahun 2013 – 2022. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA*, 8(1), 49-55.
- Fajar, C.M. & Pratiwi, I.I. (2021). Pengaruh Investasi Industri Manufaktur dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2018. *Jurnal Financia*, 2(2), 72-80.
- Gibbons, S., et al. (2019). New road infrastructure: The effects on firms. *Journal of Urban Economics*, 110(2019), 35–50.
- Hia, dkk. (2024). Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, dan Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6 (1), 16-28.
- Hirschman, A. O. (1959). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Lakshmanasamy, T. (2022). The Effect of Central Financial Transfers on *Tax Efforts* of States in India: A Panel Data Analysis. *Journal of International Money, Banking and Finance*. 3 (1): 51 – 68.
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB per Kapita, *Tax Effort*, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 2337-3814.
- Naganathan, M., & Sivagnanam, K. J. (1999). Federal transfers and *Tax Efforts* of states in India. *Indian Economic Journal*, 47(4), 101-110.
- Nugroho, Yohanes Adi & Wana, Desty. (2021). Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Upaya Pemungutan Pajak (*Tax Effort*) Provinsi di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi*. Volume 9, Nomor 1. Hal 224-232.
- Oates, Wallace E. (2006). On the theory and practice of fiscal decentralization. IFIR Working Paper No. 2006-05. <https://www.researchgate.net/publication/5110773> On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization
- Partridge, M., & Rickman, S. (2000). *The service economy*. Cambridge University Press.

- Prasetyo, Ewa, dkk. (2022). Pengaruh Jumlah UMKM, Jumlah Pendapatan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Bisnis*, 5(1), 90-102.
- Rokhmat, A., dkk. (2020). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Jalan Provinsi, Air Bersih, Hotel, Penginapan dan Restoran terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 70-88.
- Safitri D. dkk. (2020). Pengaruh Jumlah UMKM dan Modal UMUM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2(2), 62-72.
- Safitri R. dkk. (2020). Pengaruh beberapa sektor ekonomi terhadap pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. 18 (4),657-671.
- Sholikhah, I. & Utomo, Y.P. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB Sektor Pertanian, PDRB Sektor Industri, PDRB Sektor Jasa dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2002-2020. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(4), 446-454.
- Sipur & Almastoni. (2021). Analisis UMKM Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah CORE IT*, 9(4), 5-11.
- Smith, Adam. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Tasyim, dkk. (2021). Pengaruh Jumlah Unit Usaha UMKM dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(3), 391-400.
- Susila & Pradhani. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 72-87.
- Wahyuningtias, A. D. (2021). Analisis Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 1-11.
- Wang, Q., Shen, C., & Zou, H. (2009). Local government tax effort in China: An analysis of provincial tax performance. *Région et Développement*, 29, 203-236.
- Yousaf, T., et al. (2022). The crowding in (out) effect of intergovernmental transfers on local government revenue generation: Evidence from Pakistan. *Review of Public Economics*, 242(3/2022), 3-28.

